



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI, BKKBN, BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

---

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BNP2TKI
Sifat	: <b>Terbuka</b>
Hari, tanggal	: Senin, 1 Februari 2010
Waktu	: Pukul 14.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	: dr. Ahmad Nizar Shihab, Ds.An/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: 1. Paparan BNP2TKI tentang Tupoksi. 2. Realisasi Anggaran Tahun 2009. 3. Program Kerja 4. Lain-lain.
Jumlah kehadiran	: Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, orang Ijin,

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNP2TKI dibuka pukul 14.20 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1), rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
2. Untuk melaksanakan fungsinya, BNP2TKI bertugas :
  - a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).
  - b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan; peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

3. Dalam melaksanakan program kerjanya, BNP2TKI telah melaksanakan promosi keluar negeri. Dari hasil kunjungan dalam mencari peluang kerja di negara penempatan pada kawasan Asia Pacific, Australia, New Zealand, Amerika, Kanada, Timur Tengah, Eropa dan Afrika, telah didapat peluang kerja untuk tenaga *Nurse, Caregiver, Careworkers, Perkapalan, Welder Fishing, Manufacture, Services, Hospitality, Construction Workers, Spa Therapist, Security Officer, Oil Driller, Chemical, Fruit Picker, Bucher* dan lain-lain, dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2015 sebanyak 4.035.484 orang. Mengingat banyaknya peluang kerja di luar negeri, BNP2TKI bersama instansi terkait perlu melakukan revitalisasi BLK untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga trampil yang dibutuhkan pasar kerja di luar negeri.
4. Realisasi penempatan TKI tahun 2009 sebanyak 271.115 orang meliputi kawasan Asia Pacific dan Timur Tengah, terdiri dari TKI Formal sebanyak 93.093 orang (32,48%) dan TKI Informal sebanyak 178.022 orang (67,52%). Jumlah penempatan ini lebih kecil dibandingkan dengan penempatan TKI tahun 2008 sebanyak 748.825 orang, terdiri dari TKI Formal sebanyak 269.346 orang (36%) dan TKI Informal sebanyak 470.470 orang (64%). BNP2TKI menilai bahwa pelayanan kepada TKI menurun drastis karena terjadinya dualisme pelayanan oleh BNP2TKI dan Kemnakertrans.
5. Untuk menanggulangi praktek-praktek pengiriman TKI non prosedural (illegal) serta perekrutan CTKI oleh calo/sponsor, BNP2TKI telah membentuk Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN) dan untuk meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang lebih prosedural dibangun sistem yang efisien, handal dan informatif, BNP2TKI telah membuat Sistem Pelayanan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (SPPTKLN), yaitu sistem komputerisasi *online* berbasis *web application* yang terpadu dan komprehensif.
6. BNP2TKI dalam tahun Anggaran 2009 memperoleh pagu Anggaran sebesar Rp. 274.771.907.000,-, dengan realisasi mencapai Rp. 232.754.500.790 (84,71%). Program BNP2TKI tahun 2010 berbasis kinerja yaitu Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI, dengan pagu anggaran Rp. 253.519.140.000,-
7. Berkaitan dengan wacana penutupan terminal bagi TKI, BPK.TKI Selapajang Soekarno Hatta, BNP2TKI menyarankan perlu dipertimbangkan secara matang mengingat TKI yang pulang pada umumnya wanita yaitu 341.656 TKI (97%), sedangkan TKI Pria hanya 11.815 TKI (3%), serta jam kedatangan TKI bervariasi dan daerah tujuan kepulangan TKI yang mencapai 114 tujuan, serta dikhawatirkan terjadinya pemerasan oleh oknum preman selama di perjalanan.
8. BNP2TKI perlu melakukan upaya harmonisasi dengan Kemnakertrans, karena berlarut-larutnya ketidakharmonisan ini menyebabkan terlantarnya para TKI. BNP2TKI dan Kemnakertrans diminta duduk bersama menyelesaikan permasalahan dualisme penanganan TKI di tanah air.
9. BNP2TKI perlu melakukan sosialisasi berkaitan dengan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) di daerah-daerah, sekaligus menjelaskan peran dan kewenangan daerah dalam penerbitan KTKLN dan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena menyangkut akurasi *single identity* bagi TKI di luar negeri.
10. BNP2TKI hendaknya mereformasi dan mengevaluasi mekanisme pemulangan TKI, menyiapkan *shelter, help desk* dan mekanisme rujukan bagi TKI yang bermasalah, menempatkan LSM di terminal IV Selapanjang, bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk keamanan dalam pemulangan TKI ke daerah asal.
11. BNP2TKI diharapkan menertibkan keberadaan travel bus pengantar TKI yang akan mengantar TKI ke kampung halaman, karena diduga TKI mengalami pemerasan oleh para supir travel bus.
12. Perlu penanganan yang serius terhadap kasus TKI Fiktif yang akan berangkat ke Korea dan TKI yang berencana berangkat ke Selandia Baru namun gagal berangkat, padahal para TKI telah menyetor uang yang cukup besar. Perlu langkah antisipasi BNP2TKI untuk melindungi

TKI yang berada di Malaysia, terkait adanya isu akan terjadi razia besar-besaran oleh pemerintah Malaysia terhadap para Tenaga Kerja Asing di Malaysia.

13. Sehubungan dengan rencana BNP2TKI dalam merestrukturisasi pegawainya, diusulkan untuk ditangguhkan, karena selama masih ada dualisme dalam penanganan TKI, maka rencana restrukturisasi BNP2TKI tak akan berdampak maksimal terhadap kinerja BNP2TKI dalam melayani TKI.
14. Agar tercipta harmonisasi dan sinkronisasi antara BNP2TKI dan Kemnakertrans, maka perlu ada revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, oleh karena itu diharapkan BNP2TKI dapat memberikan masukan materi kepada Komisi IX DPR RI terkait dengan revisi Undang-undang tersebut.

### III. KESIMPULAN

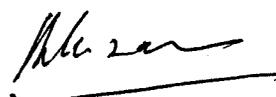
Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI pada hari ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk tetap menjalin kerjasama secara intensif dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Kemnakertrans dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan tenaga kerja Indonesia di luar negeri mengingat bahwa BNP2TKI bertanggungjawab kepada Presiden dengan berkoordinasi kepada Kemnakertrans.
2. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI dan Kemnakertrans bersama-sama mereformasi dan mengevaluasi mekanisme pemulangan TKI, menyiapkan *shelter* bagi TKI yang bermasalah, *help desk*, mekanisme rujukan bekerjasama dengan kepolisian untuk masalah keamanan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI agar dalam pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri menyangkut akurasi *single identity* bagi tenaga kerja di luar negeri.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan kepulangan TKI dan segera memulangkan TKI yang bermasalah serta memberikan hak-hak normatif TKI yang seharusnya mereka terima.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk segera memberikan masukan dalam rangka pembahasan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri agar tercipta harmonisasi dan sinkronisasi antara BNP2TKI dan Kemnakertrans.
6. Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah untuk mencari jalan terbaik guna pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No. 05/P/HUM/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang judicial review terhadap Permenakertrans No. 22 Tahun 2008 demi kepentingan tenaga kerja Indonesia.

Rapat diakhiri pukul 17.30 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI

Wakil Ketua,



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DS.An